

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, proses *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park (PMP) belum dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang inklusif, partisipatif, dan *equal*. Secara struktural, kolaborasi terbangun kuat antar aktor formal yaitu OPD yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan serta LSM dari Kemitraan Indonesia. Hubungan kerja antar aktor formal berjalan harmonis, pembagian peran jelas, dan komitmen terhadap perlindungan kawasan pesisir cukup kuat. Namun, proses tersebut bersifat eksklusif secara kelembagaan karena hanya melibatkan aktor formal tanpa menghadirkan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan lokal. Inklusivitas belum terwujud karena masyarakat tidak dilibatkan secara sistematis dalam forum dialog, penyusunan strategi, maupun tindak lanjut implementasi program. Partisipasi yang terjadi belum substantif karena masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sehingga posisinya bergeser menjadi penerima dampak pasif.

Prinsip *equality* belum terpenuhi karena meskipun relasi antar OPD dan LSM bersifat horizontal, hubungan terhadap masyarakat masih timpang yang ditandai dengan tidak adanya akses terhadap transparansi anggaran dan legitimasi peran dalam pengelolaan. Dalam konteks ekowisata berbasis lingkungan, masyarakat

tidak boleh tersisihkan dari proses kolaborasi karena keberlanjutan kawasan sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, pengelolaan PMP menunjukkan kolaborasi institusional yang kuat antar pemerintah dan LSM tetapi belum memenuhi prinsip *collaborative governance* yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada:

- a. OPD terkait (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan)
 1. Melibatkan masyarakat secara substantif dan formal dalam struktur pengelolaan kawasan, termasuk dalam forum perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.
 2. Mengembangkan skema pengelolaan ekowisata berbasis komunitas agar masyarakat memiliki peran sekaligus manfaat ekonomi dari keberlanjutan kawasan.
- b. Kemitraan Indonesia
 1. Melibatkan masyarakat dalam proses dialog dengan OPD serta memastikan setiap program adaptasi perubahan iklim dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan yang partisipatif dan inklusif

sehingga masyarakat berperan sebagai subjek dalam pengelolaan ekowisata.